

## ABSTRAK

**RIZKY ALAMSYAH**, *Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.*

Kebijakan publik seringkali menjadi topik yang dibicarakan mengingat banyaknya pengguna kebijakan, untuk pemerintah membuat kebijakan bukanlah hal yang mudah, karena sebuah kebijakan baru akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah, untuk kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh pengguna kebijakan. Seperti Peraturan baru Menteri Keuangan dengan nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau. Kenaikan suatu biaya sangatlah menjadi tantangan besar bagi pemerintah, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia masih memiliki pemikiran bahwa kenaikan suatu biaya akan membawa dampak buruk bagi suatu usaha. Tetapi bagaimana hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah khususnya KPPBC TMP A Bandung untuk merubah pemikiran tersebut dengan terus diadakannya sosialisasi tentang kebijakan baru tersebut kepada para pengusaha tembakau khususnya daerah Jawa Barat. Kebijakan itu dibuat untuk menangani kasus banyaknya pengusaha tembakau yang tidak tercatat di pemerintah setempat, dengan adanya pita cukai maka masyarakat pengguna tembakau paham akan tembakau yang sudah tercatat atau resmi dan mana tembakau yang tidak resmi.

Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis sejauh mana implementasi PMK nomor 146/PMK.010/2017 yang diselenggarakan oleh KPPBC TMP A Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, peneliti mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data yang didapat untuk menelaah suatu topik penelitian secara mendalam, intensif dan komprehensif dari segi jenis penelitian, untuk memperoleh informasi, penulis melakukan observasi studi kepustakaan dan wawancara dengan informan.

Penelitian ini mengacu kepada teori manajemen implementasi kebijakan publik dengan Model Riant Nugroho yang dalam pendekatannya menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan penulis, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi PMK dengan nomor 146/PMK.010/2017 masih dalam tahap pemantauan oleh aparaturnya setempat. Karena kebijakan tersebut terbilang baru dilaksanakan dan pemerintah belum dapat mengevaluasi bagaimana hasil dari penerapan kebijakan tersebut. Masih terdapat pula hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut salahsatunya adalah susahnyanya memberikan pemahaman bahwa dengan adanya PMK tersebut tidak akan membuat para pengusaha tembakau merugi jika dikondisikan dengan baik. Tetapi pemerintah KPPBC TMP A Bandung selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada para masyarakat khususnya para pengusaha tembakau, agar tidak adanya miss komunikasi yang dapat menghambat jalannya kebijakan baru tersebut.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Keuangan

## ABSTRACT

**RIZKY ALAMSYAH**, *Implementation of Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 146 / PMK.010 / 2017 Concerning Tobacco Product Excise Tariffs at the Customs and Excise Supervision and Service Office of Type A Customs A Bandung.*

*Public policy is often the topic of discussion considering the large number of policy users, for the government to make policies is not an easy thing, because a new policy will be a big challenge for the government, for this policy can be well received by policy users. Such as the new regulation of the finance minister by number 146 / PMK.010 / 2017 concerning the increase in tobacco excise fees. The increase in a cost is a big challenge for the government, because basically the Indonesian people still have the idea that an increase in costs will have a detrimental effect on a business. But how this has become a challenge for the government, especially KPPBC TMP A Bandung, to change this thinking by continuing to disseminate information about the new policy to entrepreneurs in the West Java region. The policy was made to deal with the number of unregistered tobacco entrepreneurs in the government, with the existence of excise tapes, the people who know tobacco tobacco have been registered or official and which are unofficial tobacco.*

*This study explains and analyzes the extent of the implementation of the regulation of the finance minister number 146 / PMK.010 / 2017 held by KPPBC TMP A Bandung. The method used in this study is a qualitative method, researchers mengumpulkan, analyze and interpret the data obtained to examine a research topic in depth, intensive and comprehensive in terms of the type of research, to obtain information, the author conducted a study of library observation and interviews with informants.*

*This study refers to the theory of management implementation of public policy with Model Riant Nugroho which in its approach describes the implementation or implementation of policies in the context of management within the framework of organizing-leading-controlling.*

*Based on the discussion explained by the author, this study can be concluded that the implementation of PMK with number 146 / PMK.010 / 2017 is still in the monitoring stage by the local apparatus. Because the policy is fairly new and the government has not been able to evaluate how the results of the policy are implemented. There are still obstacles in the implementation of the policy, one of which is that it is difficult to provide an understanding that the regulation of PMK will not make tobacco entrepreneurs lose money if they are properly conditioned. But the KPPBC TMP A Bandung government always strives to give the best to the community, especially tobacco entrepreneurs, so that there is no miss communication that can hamper the running of the bar policy.*

**Keywords:** *Implementation, Minister of Finance Regulation*